

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

Menurut Jusup (2014), pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan audit adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pengguna laporan keuangan yang berkepentingan.

Audit secara umum dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh klien, untuk mendapatkan pernyataan kewajaran pada laporan keuangan klien. Auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan penyesaian dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan merupakan audit yang bertujuan untuk menentukan target audit telah sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak berwenang dalam membuat kriteria. Audit kepatuhan ini banyak ditemui pada instansi pemerintahan.

3. Audit Operasional

Audit operasional merupakan peninjauan kembali secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan disebut dengan laporan audit. Pendapat auditor biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis, umumnya dalam bentuk laporan audit baku. Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat.

Dalam SA 705, terdapat empat opini auditor yang diterbitkan oleh auditor:

1. Opini wajar tanpa pengecualian
2. Opini wajar dengan pengecualian
3. Opini tidak wajar
4. Opini tidak memberikan pendapat

Auditor harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkakan IAI.

2.2 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan pencapaian tujuan. Pengukuran efektivitas dapat diukur dengan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Menurut Akmal (2007) ciri-ciri pengendalian internal efektif yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuannya jelas. Jika suatu pengendalian internal tidak dapat dimengerti, prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan tidak memiliki nilai.
- b. Dibangun untuk tujuan bersama. Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna atau seluruh pihak yang berkaitan
- c. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan
- d. Didokumentasikan. Proses dokumentasi yang baik yakni proses dokumentasi yang sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti, jelas hubungannya

dengan risiko pengendalian, dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian internal berada pada tempatnya.

- e. Dapat diuji dan di-*review*. Proses pengendalian dan manajemen serta dokumentasinya dapat diuji dan di-*review* untuk dapat disempurnakan atau dapat diperbarui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalian dilakukan.

Pada dasarnya, efektivitas mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan serta merumuskan suatu program dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas dalam hal ini merupakan suatu dimensi dari produktifitas yang mengarah pada pencapaian kinerja, yaitu pencapaian hasil yang memuaskan untuk setiap sasaran yang diberikan dengan kuantitas dan waktu.

2.3 Pengendalian Internal

2.3.1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2014: 180), “Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi”. Menurut Tunnakotta (2012: 352), “Pengendalian internal adalah proses kebijakan, prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuat laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku”.

Menurut Agoes (2012: 79), “Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan

kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku”.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013: 15) pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut :

“Internal control is a process, effected by an entity”s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: (1) effectiveness and efficiency of operations; (2) reliability of financial reporting; (3) compliance with applicable laws and regulation”.

2.3.2. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian merupakan jawaban untuk menangkal adanya suatu ancaman (kemungkinan terjadinya risiko). Menurut Jusup (2014) tujuan pengendalian internal dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1.) Keandalan pelaporan keuangan entitas
- 2.) Efektivitsa dan efisiensi operasi entitas
- 3.) Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan

Menurut Mulyadi (2014: 163), tujuan pengendalian internal yaitu:

- 1.) Menjaga kekayaan organisasi
- 2.) Mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi
- 3.) Mendorong efisiensi
- 4.) Dipusatkan pada titik pengendalian strategis
- 5.) Ekonomis
- 6.) Fleksibel
- 7.) Berorientasi pada perbaikan

2.3.3. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Setiap perusahaan memiliki karakteristik atau sifat-sifat khusus yang berbeda. Karena perbedaan karakteristik tersebut, pengendalian internal yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan lainnya. Oleh sebab itu untuk menciptakan pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)* (2013:45), Pengendalian internal mempunyai lima komponen, yaitu:

1.) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dalam *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)* (2013:56), terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian antara lain:

- a) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:86), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Menetapkan pola atau gaya di tingkat puncak

Dewan direksi dan manajemen pada semua level entitas menunjukkan melalui arahan, tindakan, dan perilaku mereka mengenai pentingnya

integritas dan nilai-nilai etika untuk mendukung fungsi sistem pengendalian internal.

- Menetapkan standar perilaku

Ekspektasi dewan direksi dan manajer senior mengenai integritas dan nilai-nilai etika didefinisikan dalam standar entitas dengan menetapkan standar perilaku pada semua karyawan.

- Mengevaluasi ketaatan untuk standar yang dilakukan

Proses untuk mengevaluasi kinerja individu dan tim dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan.

- Membicarakan penyimpangan pada waktu yang tepat

Simpangan dari standar yang diharapkan entitas diidentifikasi dan diperbaiki secara konsisten dan tepat waktu.

- b) Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:93), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Menetapkan tanggungjawab pengawasan

Dewan direksi mengidentifikasi dan menerima tanggungjawab pengawasan dalam hubungan untuk menetapkan persyaratan dan kompetensi.

- Menggunakan keahlian yang relevan

Dewan direksi mendefinisikan, memelihara, dan secara periodik mengevaluasi keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan di antara

anggota-anggotanya untuk memampukan mereka menanyakan pertanyaan pemeriksaan dari manajemen senior dan mengambil tindakan yang cocok.

- Mengoperasikan secara independen

Dewan direksi mempunyai anggota yang cukup yang independen dari manajemen dan bertujuan dalam mengevaluasi dan membuat keputusan.

- Menyediakan pengawasan untuk sistem pengendalian internal Dewan direksi memberikan tanggungjawab pengawasan untuk desain manajemen, implementasi, dan melakukan pengendalian internal.

- c) Manajemen menetapkan dengan badan pengawas, struktur, alur pelaporan, dan otoritas dan tanggungjawab yang tepat dalam pencapaian tujuan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:102), terdapat tiga poin penting berhubungan dengan karakteristik prinsip ini, yaitu:

- Mempertimbangkan seluruh struktur dalam entitas

Manajemen dan dewan direksi mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan.

- Menetapkan alur pelaporan

Manajemen mendesain dan mengevaluasi alur pelaporan untuk setiap struktur entitas untuk mampu melaksanakan otoritas dan tanggung jawab dan mengalirkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas.

- Mendefinisikan, memberikan, dan membatasi otoritas dan tanggung jawab.

Otoritas memberikan wewenang kepada seseorang untuk berperilaku seperti yang dibutuhkan, namun otoritas seseorang juga perlu untuk mendefinisikan batasan wewenangnya. Manajemen dan dewan direksi mendelegasikan wewenang, mendefinisikan tanggung jawab, dan menggunakan proses dan teknologi yang tepat untuk menempatkan tanggung jawab dan pemisahan tugas pada berbagai level dalam organisasi.

- d) Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara orang-orang yang kompeten sejalan dengan tujuan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:102), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan praktek
Kebijakan dan praktek mencerminkan ekspektasi kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- Mengevaluasi kompetensi dan membicarakan kekurangan
Dewan direksi dan manajemen mengevaluasi kompetensi untuk sumber daya manusia dalam organisasi maupun penyedia jasa dari luar (*outsourcing*) dalam relasi untuk menetapkan kebijakan dan praktek, dan membicarakan kekurangan-kekurangan jika diperlukan.
- Menarik, mengembangkan, dan memelihara individu-individu atau sumber daya manusia.

Organisasi menyediakan konsultasi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menarik, mengembangkan dan memelihara personel ataupun

penyedia jasa dari luar yang cukup dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan.

- Perencanaan dan persiapan untuk penggantian

Manajemen senior dan dewan direksi mengembangkan kemungkinan rencana untuk tugas dari tanggung jawab yang penting dalam pengendalian internal.

- e) Organisasi memiliki orang-orang yang bertanggungjawab untuk tanggung jawab pengendalian internal mereka sejalan dengan tujuan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:102), terdapat lima poin penting berhubungan dengan karakteristik prinsip ini, yaitu:

- Menjalankan akuntabilitas melalui struktur, otoritas dan tanggung jawab. Akuntabilitas mengarah ke kepemilikan wewenang untuk kinerja pengendalian internal dalam pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang dihadapi oleh entitas. Manajemen dan dewan direksi menetapkan mekanisme untuk mengkomunikasikan dan memiliki individu yang bertanggungjawab untuk kinerja tanggung jawab pengendalian internal seluruh organisasi dan mengimplementasikan tindakan perbaikan jika dibutuhkan.

- Menetapkan pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan.

Manajemen dan dewan direksi menetapkan pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan lain yang tepat untuk tanggung jawab pada semua level pada entitas, mencerminkan dimensi yang tepat dari kinerja dan mengharapkan standar dilaksanakan, dan mempertimbangkan

pencapaian tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

- Mengevaluasi pengukuran kinerja, insentif, dan penghargaan secara relevan dan terus-menerus.

Manajemen dan dewan direksi menyetujui insentif dan penghargaan dengan penyelesaian tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan.

- Mempertimbangkan tekanan yang terlalu banyak

Manajemen dan dewan direksi mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan yang diasosiasikan pencapaian tujuan dengan mereka memberikan tanggung jawab, mengembangkan pengukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.

- Mengevaluasi kinerja dan penghargaan atau kedisiplinan individu.

Manajemen dan dewan direksi mengevaluasi kinerja tanggung jawab dan mengharapkan level-level kompetensi dan menyediakan penghargaan atau pelatihan tindakan disiplin yang tepat.

2.) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal maupun internal. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko terhadap pencapaian tujuan dianggap “relatif” atau tergantung pada toleransi risiko yang ditetapkan entitas. Menurut *Committee of*

Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)

(2013:57), terdapat empat prinsip berkaitan dengan penaksiran risiko, yaitu:

a) Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk mampu mengidentifikasi dan menaksir risiko yang terkait dengan tujuan.

Dalam prinsip ini, tujuan-tujuan berkaitan dengan tujuan operasi, tujuan pelaporan (baik internal maupun eksternal), dan tujuan kepatuhan.

- Hal-hal yang berhubungan dengan tujuan operasi yaitu: mencerminkan pilihan manajemen, mempertimbangkan batas toleransi yang dapat diterima untuk risiko, memasukkan tujuan kinerja operasi dan keuangan, dan membentuk suatu dasar untuk menjalankan sumber daya.
- Hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pelaporan keuangan kepada pihak eksternal antara lain: patuh dengan standar akuntansi yang dapat diterapkan, mempertimbangkan materialitas, dan mencerminkan aktivitas entitas.
- Hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pelaporan non- keuangan eksternal, terdiri dari: patuh terhadap standar dan frameworks yang ditetapkan pihak eksternal, mempertimbangkan level ketelitian yang dibutuhkan, dan mencerminkan aktivitas entitas.
- Poin-poin yang berkaitan dengan tujuan pelaporan internal antara lain: mencerminkan pilihan manajemen, mempertimbangkan level ketelitian yang dibutuhkan, dan mencerminkan aktivitas entitas.
- Poin-poin yang berkaitan dengan tujuan kepatuhan antara lain:

mencerminkan hukum dan regulasi eksternal dan mempertimbangkan toleransi yang dapat diterima atas risiko.

- b) Organisasi mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuan untuk semua entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko seharusnya dikelola.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:139), terdapat lima poin penting berhubungan dengan karakteristik prinsip ini, yaitu:

- Memasukkan level entitas, cabang, divisi, unit operasi, dan fungsional. Organisasi mengidentifikasi dan menilai risiko pada level entitas, cabang, divisi, unit operasi, dan fungsional yang relevan dengan pencapaian tujuan. Identifikasi risiko merupakan proses yang berulang dan biasanya diintegrasikan dengan proses perencanaan.
- Menganalisis faktor internal dan eksternal.

Identifikasi risiko mempertimbangkan faktor eksternal dan internal dan pengaruhnya dalam pencapaian tujuan. Faktor eksternal, terdiri dari: ekonomi, lingkungan alam, regulasi, sosial, teknologi, dan operasi di negara asing (*foreign operation*). Sedangkan faktor internal, terdiri dari: infrastruktur, struktur manajemen, personel, akses atas aset, dan teknologi.

- Melibatkan level manajemen yang tepat.

Organisasi memasukkan mekanisme penaksiran risiko yang efektif dengan melibatkan level manajemen yang tepat.

- Mengestimasi tingkat signifikan risiko yang teridentifikasi.

Risiko yang diidentifikasi dianalisis melalui suatu proses termasuk mengestimasi risiko signifikan yang potensial.

- Menentukan bagaimana respon terhadap risiko.

Penaksiran risiko termasuk mempertimbangkan bagaimana risiko sebaiknya diatur entah itu diterima, dihindari, dikurangi, maupun dibagi.

- c) Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam penaksiran risiko untuk mencapai tujuan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:151), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Mempertimbangkan berbagai jenis kecurangan (*fraud*).

Penaksiran kecurangan mempertimbangkan pelaporan yang curang, kemungkinan kehilangan aset, dan korupsi yang dihasilkan dari berbagai cara bahwa kecurangan dan kejahatan bisa terjadi.

- Menaksir dorongan dan tekanan.

Dorongan dan tekanan biasanya dihasilkan dari lingkungan pengendalian. Hal ini dapat merupakan pengaruh yang potensial untuk risiko kecurangan.

- Menaksir kesempatan.

Kesempatan mengacu pada kemampuan untuk sebenarnya memperoleh, menggunakan, atau membuang aset yang mungkin disertai dengan perubahan pencatatan entitas. Kesempatan diciptakan oleh aktivitas

pengendalian dan pengawasan yang lemah, pengawasan manajemen yang buruk, dan penolakan kontrol manajemen.

- Menaksir perilaku dan rasionalisasi.

Penaksiran risiko kecurangan mempertimbangkan bagaimana manajemen dan personel lainnya mungkin terlibat dalam dan membenarkan tindakan yang salah.

- d) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang bisa berpengaruh pada sistem pengendalian internal secara signifikan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:159), terdapat tiga poin penting berhubungan dengan prinsip ini, antara lain:

- Menaksir perubahan dalam lingkungan eksternal.

Proses identifikasi risiko mempertimbangkan perubahan regulasi, ekonomi, dan lingkungan fisik di mana entitas beroperasi.

- Menaksir perubahan dalam model bisnis.

Organisasi mempertimbangkan pengaruh potensial dari jenis bisnis baru, secara dramatis mengubah komposisi dari jenis bisnis yang telah ada, memperoleh atau melepaskan operasi bisnis pada sistem pengendalian internal, pertumbuhan yang cepat, perubahan dalam geografi asing, dan teknologi baru.

- Menaksir perubahan dalam kepemimpinan.

Organisasi mempertimbangkan perubahan dalam manajemen dan tindakan masing-masing dan filosofi dalam sistem pengendalian internal.

3.) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*) dilakukan di semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan pada lingkup teknologi. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)* (2013: 57-58), terdapat tiga prinsip yang berhubungan dengan aktivitas pengendalian, antara lain:

- a) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi dalam pencegahan risiko untuk mencapai tujuan pada level yang dapat diterima.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:166), terdapat enam poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Mengintegrasikan dengan penaksiran risiko.

Aktivitas pengendalian membantu menjamin bahwa respon risiko yang menyebut dan mengurangi risiko dilakukan.

- Mempertimbangkan faktor spesifik entitas.

Manajemen mempertimbangkan bagaimana lingkungan, kompleksitas, alam, dan bidang operasi, maupun karakteristik organisasi yang spesifik mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.

- Menetapkan proses bisnis yang relevan.

Manajemen menetapkan proses bisnis yang relevan yang memerlukan aktivitas pengendalian.

- Mengevaluasi campuran tipe pengendalian internal.

Aktivitas pengendalian termasuk susunan dan berbagai pengendalian dan mungkin termasuk suatu kesinambungan untuk mengurangi risiko, mempertimbangkan kontrol secara manual ataupun otomatisasi, dan kontrol pencegahan dan detektif.

- Mempertimbangkan pada level apa aktivitas pengendalian pada berbagai level dalam entitas.

Manajemen mempertimbangkan aktivitas pengendalian pada berbagai level dalam entitas.

- Adanya pemisahan tugas.

Manajemen melakukan pemisahan tugas antara tugas-tugas yang berpotensi untuk terjadinya kecurangan. Tugas-tugas yang biasanya dipisahkan adalah fungsi otorisasi, fungsi pemegang harta, dan fungsi pencatat.

- b) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang umum melalui teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan. Menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated Framework* (2013:178), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Menentukan ketergantungan antara kegunaan teknologi dalam proses teknis dan teknologi dalam pengendalian umum. Manajemen memahami dan menetapkan ketergantungan dan hubungan antara proses

bisnis, aktivitas pengendalian yang otomatis, dan pengendalian teknologi secara umum.

- Menetapkan infrastruktur teknologi aktivitas pengendalian yang relevan.
Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian melalui infrastruktur teknologi yang didesain dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi dan ketersediaan dari proses teknologi.
- Menetapkan aktivitas pengendalian dalam proses keamanan manajemen yang relevan.
Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses atas teknologi untuk mengotorisasi pengguna yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan mereka dan untuk melindungi aset entitas dari ancaman eksternal.
- Menetapkan proses akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan aktivitas pengendalian yang relevan.
Manajemen memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian melalui akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dan infrastruktur untuk mencapai tujuan manajemen.

c) Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang memasukkan kebijakan dalam tindakan.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:184-185), terdapat

enam poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mendukung penyebaran arahan manajemen.

Manajemen menetapkan aktivitas pengendalian yang dibangun menjadi proses bisnis dan aktivitas karyawan sehari-hari melalui penetapan kebijakan yang diharapkan dan tindakan sesuai dengan prosedur yang relevan.

- Menetapkan tanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan dan prosedur.

Manajemen menetapkan tanggung jawab untuk aktivitas pengendalian dengan manajemen unit bisnis atau fungsi yang memiliki risiko yang relevan.

- Melaksanakan dalam cara yang tepat waktu.

Tanggung jawab personel melaksanakan aktivitas pengendalian dalam cara yang tepat waktu didefinisikan dengan kebijakan dan prosedur.

- Mengambil tindakan perbaikan.

Tanggung jawab personel menginvestigasi dan bertindak dalam persoalan yang diidentifikasi sebagai hasil pelaksanaan aktivitas pengendalian.

- Pelaksanaan menggunakan personel yang kompeten.

Personel yang kompeten dengan otoritas yang cukup melaksanakan aktivitas pengendalian dengan rajin dan fokus terus-menerus.

- Menaksir kembali kebijakan dan prosedur.

Manajemen secara periodik mereview aktivitas pengendalian untuk menetapkan keberlangsungan yang relevan dan memperbaruinya ketika dibutuhkan.

4.) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dibutuhkan entitas untuk melakukan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan. Manajemen menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas dari sumber eksternal dan internal untuk mendukung fungsi dari pengendalian internal. Komunikasi merupakan proses yang berulang untuk menyediakan, membagi, dan menghasilkan kebutuhan informasi. Komunikasi internal adalah informasi yang disebarkan dalam seluruh organisasi. Sedangkan komunikasi eksternal ada dua macam, yaitu memungkinkan datangnya komunikasi dari informasi eksternal yang relevan dan menyediakan informasi untuk pihak.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) (2013:58), ada tiga prinsip yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, yaitu:

a) Organisasi menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Menurut COSO(2013:193), terdapat lima poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Mengidentifikasi keperluan informasi.

Suatu proses untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan

diharapkan untuk mendukung fungsi komponen lain dari pengendalian internal dan mencapai tujuan entitas.

- Mendapatkan sumber data internal dan eksternal.

Sistem informasi mengungkap sumber data internal dan eksternal.

- Memproses data yang relevan menjadi informasi.

Sistem informasi memproses dan mentransformasikan data yang relevan menjadi informasi.

- Memelihara kualitas melalui pemrosesan.

Sistem informasi memproduksi informasi yang tepat waktu, sekarang, akurat, lengkap, dapat diakses, dilindungi, dan dapat diverifikasi dan dipelihara. Informasi direview untuk relevansinya dalam mendukung komponen pengendalian internal.

- Mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Sifat, jumlah, dan ketelitian dalam mengkomunikasikan informasi disertakan dan mendukung pencapaian tujuan.

- b) Organisasi secara internal mengomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:201), terdapat empat poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Mengomunikasikan informasi pengendalian internal.

Suatu proses untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan untuk memampukan seluruh personil memahami dan melakukan tanggung

jawab pengendalian internal mereka.

- Mengomunikasikan dengan dewan direksi.

Komunikasi ada di antara manajemen dan dewan direksi sehingga keduanya memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dengan menghormati tujuan entitas.

- Menyediakan pemisahan alur komunikasi.

Pemisahan saluran komunikasi, seperti saluran *whistle-blower* berada di tempat dan berfungsi sebagai mekanisme gagal dan simpan untuk memungkinkan komunikasi anonim dan rahasia ketika saluran normal berfungsi dengan tidak normal dan tidak efektif.

- Memilih metode komunikasi yang relevan.

Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, pendengar, dan sifat dari informasi tersebut.

- c) Organisasi mengomunikasikan dengan pihak eksternal mengenai persoalan yang mempengaruhi fungsi dari pengendalian internal. Menurut COSO dalam *Integrated Framework* (2013:208), terdapat lima poin penting berhubungan dengan prinsip ini, yaitu:

- Mengomunikasikan dengan pihak eksternal.

Suatu proses untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pihak eksternal termasuk *shareholders*, rekan, pemilik, pembuat regulasi, konsumen, dan analisis keuangan dan pihak eksternal lainnya.

- Memungkinkan datangnya komunikasi.

Saluran komunikasi terbuka mengizinkan masukan (*input*) dari pelanggan, pemasok, auditor eksternal, pembuat regulasi, analis keuangan, dan lainnya memberikan informasi yang relevan kepada manajemen dan dewan direksi.

- Mengomunikasikan dengan dewan direksi.

Informasi yang relevan yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan ke dewan direksi.

- Menyediakan jalur pemisahan komunikasi.

Saluran komunikasi terpisah, seperti *hotline whistle blower*, tersedia dan berfungsi sebagai mekanisme yang tidak aman untuk memungkinkan komunikasi anonim atau rahasia bila saluran normal tidak berfungsi atau tidak efektif.

- Memilih metode komunikasi yang relevan.

Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, pendengar, dan sifat komunikasi dan hukum, peraturan, dan persyaratan pengadaan.

5.) Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*) adalah evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, ada dan berfungsi. Evaluasi berkelanjutan, dibangun dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas, memberikan informasi yang tepat waktu sedangkan evaluasi terpisah, dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian

risiko, efektivitas evaluasi yang berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh regulator, kriteria yang diakui badan penetapan standar atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan dikomunikasikan kepada manajemen dewan direksi yang sesuai.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) (2013:59), ada dua prinsip yang berkaitan dengan aktivitas pengawasan, yaitu;

- a) Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.

Menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated Framework* (2013:217-218), terdapat tujuh poin penting yang berkaitan dengan prinsip ini, antara lain:

- Mempertimbangkan gabungan evaluasi yang sedang berlangsung dan terpisah.

Manajemen melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah secara seimbang.

- Mempertimbangkan tingkat perubahan.

Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis dan bisnis dalam melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

- Menetapkan dasar pemahaman.

Perancangan dan keadaan sistem pengendalian internal saat ini digunakan untuk menetapkan garis dasar untuk evaluasi berkelanjutan dan terpisah.

- Menggunakan personil yang memiliki pengetahuan.

Evaluator yang melakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dinilai.

- Terintegrasi dengan proses bisnis.

Evaluasi yang sedang berlangsung dibangun ke dalam proses bisnis dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi.

- Menyesuaikan ruang lingkup dan frekuensi

Manajemen bervariasi cakupan dan frekuensi evaluasi terpisah tergantung pada risiko.

- Mengevaluasi secara obyektif

Evaluasi terpisah dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik yang obyektif.

- b) Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal pada waktu yang tepat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, termasuk manajemen senior dan dewan direksi secara tepat. Menurut COSO dalam *Internal Control-Integrated Framework* (2013:226), terdapat tiga poin penting yang berkaitan dengan prinsip ini, antara lain:

- Menilai hasil
Manajemen dan dewan direksi menilai hasil evaluasi yang berkelanjutan dan terpisah.
- Mengomunikasikan kekurangan
Kekurangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.
- Mengawasi tindakan perbaikan.
Manajemen mencari kekurangan dan melakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu.

2.3.4. Keterbatasan Pengendalian Internal

Tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Dalam hal keterbatasan bawaan, pengendalian internal menurut Jusup (2014:358) tidak akan pernah efektif sepenuhnya meskipun telah dirancang dan diterapkan dengan sungguh-sungguh.

Meskipun manajemen dapat merancang sistem yang ideal, namun efektivitasnya tergantung pada kompetensi dan kejujuran orang-orang yang menggunakannya. Sebagai contoh, prosedur yang dirancang dengan cermat untuk perhitungan persediaan mensyaratkan dua orang pegawai untuk melakukan perhitungan secara independen. Namun apabila pegawai tersebut tidak memahami instruksi atau apabila keduanya ceroboh dalam melaksanakan penghitungan, dapat terjadi kesalahan pada hasil penghitungan.

Bahkan apabila perhitungan sudah benar, terdapat kemungkinan manajemen melakukan pelanggaran atas prosedur dengan memerintahkan pegawai untuk memanipulasi hasil perhitungan agar laba menjadi lebih besar. Bisa juga pegawai secara sengaja membuat salah saji penghitungan untuk menutupi pencurian persediaan yang dilakukannya. Tindakan dua orang atau lebih pegawai yang berkonspirasi untuk mencuri aset atau mengubah catatan disebut kolusi.

2.3.5. Pengendalian Internal Persediaan

Suatu pengendalian intern yang baik memerlukan adanya unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan pengendalian, sehingga tujuan dari pengendalian intern dapat tercapai. Menurut Mulyadi (2014:581), unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi persediaan ialah sebagai berikut:

a. Organisasi

1. Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek.
2. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan, karena karyawan di kedua fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan.

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

1. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh

Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan.

2. Pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik.
3. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan.
4. *Adjustment* terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi (kuantitas maupun harga pokok total) tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik.

c. Praktik yang Sehat

1. Kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik.
2. Penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan dua kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek.
3. Kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ke-3 dan bagian ke-2 kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian ke-2 kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik.

4. Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya.

Menurut Henry Simamora (2000:288), tujuan pengendalian internal atas persediaan adalah untuk memastikan bahwa persediaan diamankan dan dilaporkan secara benar dalam laporan keuangan. Pengendalian internal ini dapat bersifat preventif maupun detektif, Pengendalian preventif dirancang untuk mencegah terjadi kesalahan sedang pengendalian detektif dirancang untuk mendeteksi setiap kesalahan setelah terjadi.

Dari beberapa teori diatas dapat dikatakan bahwa unsur pengendalian intern atas persediaan antara lain berkaitan dengan organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta praktik yang sehat yang bertujuan untuk memastikan bahwa persediaan diamankan dan dilaporkan secara benar.

2.4 Persediaan

2.4.1. Pengertian Persediaan

Persediaan (*inventory*) merupakan salah satu pos aset yang dimiliki perusahaan dalam tujuannya untuk dijual kembali pada kegiatan operasi bisnis atau juga mejadi barang dagang yang dapat digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Perusahaan dagang melakukan aktivitas bisnisnya dengan membeli persediaan barang dagang dari *supplier* yang nantinya akan dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk dan sifat dari persediaan itu sendiri. Pada perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur membeli persediaan bahan mentah

dari *supplier* lalu mengubah bentuk dan atau sifatnya menjadi barang jadi atau setengah jadi untuk kemudian diperdagangkan kepada konsumen.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 tahun 2019 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), persediaan adalah aktiva:

- Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
- Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut pendapat Ristono (2009:2), pengertian persediaan yaitu:

Persediaan adalah barang-barang yang harus disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang.

Menurut pendapat Putri (2015), mendefinisikan persediaan dengan:

Persediaan merupakan hal penting dalam menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan khususnya perusahaan dagang. Selain itu, persediaan juga diiringi berbagai macam risiko yang dapat menyebabkan masalah seperti kerusakan, kehilangan, kadaluarsa serta jumlah persediaan yang terlalu sedikit atau sebaliknya terlalu banyak.

2.4.2. Jenis-Jenis Persediaan

Perbedaan persediaan dapat dilihat dari aktivitas bisnis perusahaan dagang dan manufaktur. Persediaan (*inventory*) dapat dibedakan untuk beberapa jenis. Menurut Munawir (2010:16), untuk perusahaan dagang persediaan merupakan semua barang-barang yang berguna untuk diperdagangkan hingga tanggal neraca masih digudang/belum laku dijual.

Sedangkan bagi perusahaan manufaktur dapat dibagi menjadi 3 yaitu persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan barang jadi.

Namun menurut Render dan Heizer (2005), persediaan dapat dibedakan berdasarkan proses manufakturnya ke dalam empat jenis, yaitu:

- **Persediaan Bahan Baku**

Persediaan yang dibeli dan tidak atau belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan dalam memisahkan *supplier* dari proses produksi.

- **Persediaan Barang Dalam Proses**

Persediaan yang merupakan bahan baku yang telah diolah namun belum selesai. Terdapat *work in process* yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk atau disebut dengan siklus waktu.

- **Persediaan Pemeliharaan, Perbaikan, dan Operasi**

Persediaan yang digunakan untuk menjaga permesinan dan proses produksi tetap produktif. Terdapat satu komponen yang tetap ada yaitu MRO. Alasannya adalah karena kebutuhan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui.

- **Persediaan Barang Jadi**

Persediaan yang telah melalui proses produksi seluruhnya atau sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi dapat

disimpan karena menunggu permintaan dari pelanggan pada masa depan.

2.4.3. Tujuan Pemeriksaan Persediaan

Persediaan yang menjadi aset penting dalam perusahaan perlu mendapat perhatian mulai dari pembelian hingga persediaan sampai ke tangan konsumen. Sukrisno Agoes (2008:206) menyebutkan, bahwa pemeriksaan persediaan bertujuan untuk:

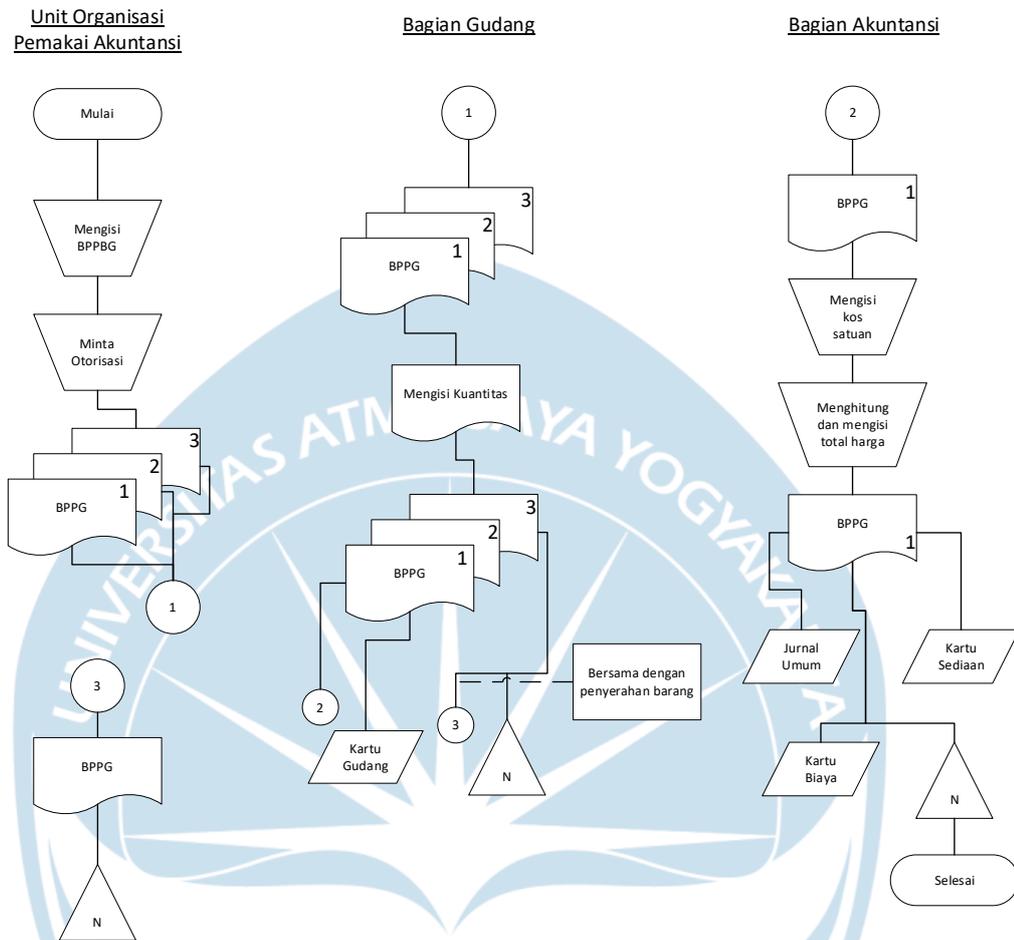
- Untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik pada persediaan.
- Untuk memeriksa apakah persediaan yang terdapat dalam neraca benar adanya dan dimiliki perusahaan pada tanggal neraca.
- Untuk memeriksa kesesuaian metode penilaian persediaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Untuk memeriksa kesesuaian sistem pencatatan persediaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Untuk memeriksa ketersediaan *allowance* yang cukup terhadap barang rusak (*defective*), bergerak dengan lambat (*slow moving*), dan ketinggalan mode (*absolence*).
- Untuk mengetahui apakah terdapat persediaan yang dijaminan kredit.
- Untuk mengetahui apakah terdapat persediaan yang mendapat asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup.

- Untuk mengetahui apakah terdapat kontrak penjual atau pembelian persediaan yang memiliki pengaruh besar pada laporan keuangan.
- Untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.4.4. Bagan Alir Sistem Akuntansi Persediaan

Persediaan dapat memiliki berbagai macam bentuk, tergantung sifat entitasnya. Untuk perusahaan dagang pengecer dan pedagang besar, akun terbesar dalam neraca sering berupa persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Sistem akuntansi persediaan barang dagang dapat dijelaskan melalui *flowchart* atau bagan alir dari persediaan barang dagang. Bagan alir akan menggambarkan secara lengkap dari sistem akuntansi persediaan barang dagang sehingga mudah untuk dipahami.

Suatu sistem akan digambarkan melalui simbol-simbol tertentu. Penggunaan bagan alir akan mempermudah auditor untuk melakukan penilaian secara efektif atau tidaknya pengendalian internal dan menghindari review secara rinci terhadap raian tertulis dan jawaban pada kuesioner pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2002:208) bagan alir sistem permintaan dan pengeluaran barang gudang sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alir Sistem Permintaan dan pengeluaran Barang Gudang